

Efektivitas Layanan Pensiun Melalui Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo

Oleh:
Fatekul Muqis
Dosen Pembimbing Isna Fitria Agustina, M.Si
Progam Studi Administrasi Publik
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Agustus, 2026

LATAR BELAKANG



Pengelolaan pelayanan publik merupakan fungsi utama pemerintah yang harus dilaksanakan secara profesional oleh ASN sesuai UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN.

Masyarakat menuntut pelayanan yang tidak menimbulkan kesenjangan antara harapan dan kenyataan sesuai UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

1) Kendala Teknis: Aplikasi SIASN sering trouble saat bersamaan dengan proses CPNS, PPPK, dan Kenaikan Pangkat. 2) Dampak Langsung: Menghambat proses usulan pensiun bulanan & berisiko keterlambatan pembayaran gaji pensiun. 3) Belum Optimal: Aspek maintenance, monitoring, dan evaluation sistem belum berjalan maksimal. 4) Beban Tinggi: 565 PNS masuk usia pensiun di tahun 2025. Hal tersebut menuntut pelayanan yang lebih cepat, tepat, dan responsif

Fokus Penelitian
Efektivitas layanan administrasi pensiun berbasis SIASN di BKD Kabupaten Sidoarjo



Metode

Pendekatan Penelitian

- **Kualitatif Deskriptif**, Menggambarkan secara mendalam efektivitas layanan pensiun melalui SIASN di BKD Kab. Sidoarjo

Fokus Penelitian

- **Teori: Sondang P. Siagian**
- **Indikator: Tepat Waktu Tepat Sasaran Tepat Guna**

Teknik Penentuan Informan

- **Purposive Sampling** : 1) Kepala BKD Kab. Sidoarjo , 2) Kabid Pengadaan & Pemberhentian, 3) Staf Pengolah , 4) Data & Informasi PNS yang mengajukan pensiun via SIASN

Teknik Pengumpulan & Analisis Data

- **Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi.**
- **Teknik Analisis Data**
Model Interaktif Miles, Huberman & Saldana:
Pengumpulan Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan



Analisis dan Pembahasan

Tiga Dimensi Efektivitas SIASN

Efektivitas implementasi SIASN dianalisis melalui tiga indikator utama yang saling melengkapi untuk mengukur keberhasilan layanan pensiun berbasis teknologi informasi.

Ketepatan Waktu

Kecepatan penyelesaian administrasi dan penerbitan SK Pensiun sebelum Terhitung Mulai Tanggal (TMT).

Ketepatan Sasaran

Kemampuan sistem menjangkau pengguna target dan menghasilkan keluaran sesuai kebutuhan layanan pensiun.

Tepat Guna

Pemanfaatan optimal SIASN untuk mendukung digitalisasi layanan tanpa pengembangan aplikasi mandiri di daerah.

Percepatan Proses Administrasi Pensiun

KETEPATAN WAKTU



SIASN mempercepat layanan pensiun secara signifikan dibandingkan sistem SAPK sebelumnya. Seluruh proses usulan dilakukan secara elektronik, memangkas tahapan birokrasi manual.

Target Pertek BKN

Paling lama 5 hari kerja untuk penerbitan Pertimbangan Teknis.

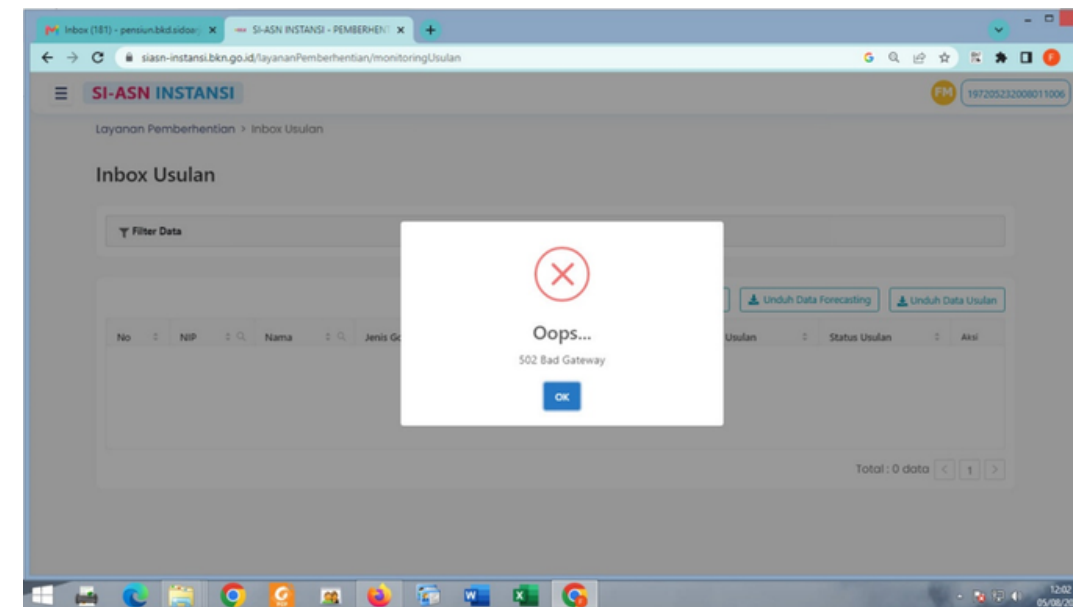
Rata-rata Validasi

Penyelesaian satu usulan pensiun rata-rata 2 minggu.

Dampak Gangguan Server

Penundaan 3–5 hari kerja saat beban sistem tinggi (CPNS, PPPK, kenaikan pangkat).

Hambatan Utama Ketepatan Waktu



Gangguan server menyebabkan SIASN tidak dapat memuat data usulan pensiun. Penyebab utama meliputi beban akses tinggi, pemeliharaan sistem, dan masalah komunikasi *frontend-backend*.

Strategi Mitigasi BKD Sidoarjo: Pengajuan usul pensiun paling lambat 6 bulan sebelum TMT untuk mengantisipasi keterlambatan akibat gangguan sistem nasional.

KETEPATAN SASARAN

Integrasi Data dan Sosialisasi Layanan



Sosialisasi SIASN

ASN dari berbagai perangkat daerah mengikuti sosialisasi prosedur, persyaratan, dan alur pengusulan pensiun melalui SIASN.



Integrasi Data Digital

SIASN mengintegrasikan data kepegawaian secara nasional, menyederhanakan mekanisme manual dan memberikan kepastian pelayanan bagi calon penerima pensiun.



Validasi DPCP

Keakuratan Daftar Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP) sangat menentukan validitas SK yang diterbitkan. Kesalahan data berpotensi menghasilkan SK yang tidak sesuai.

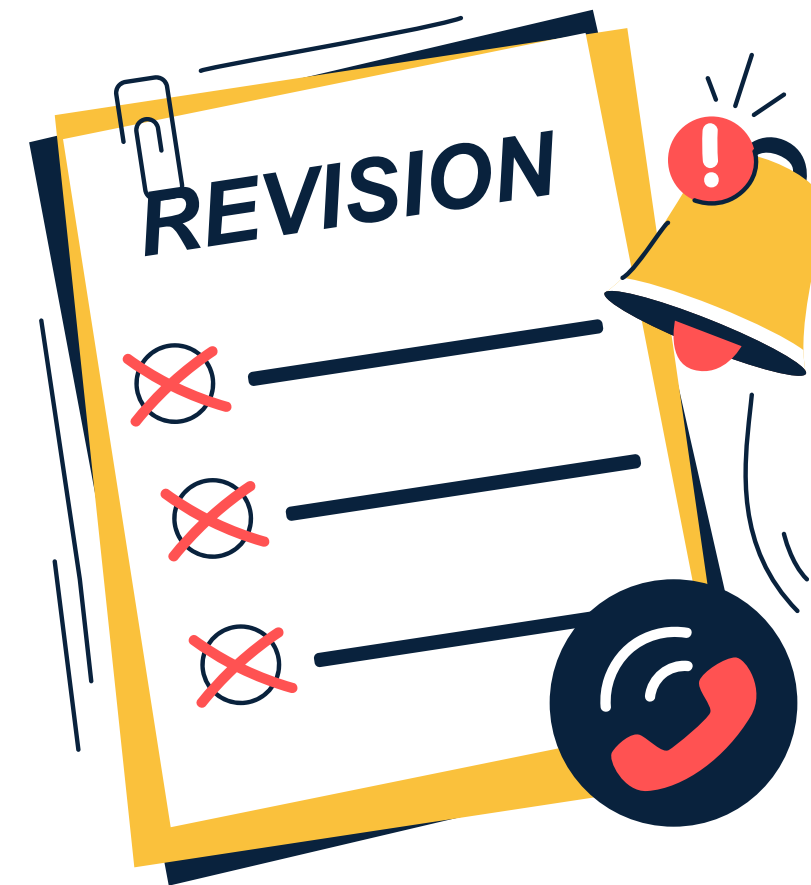
USULAN PENSIUN DAN REVISI (JANUARI–SEPTEMBER 2026)

Penyebab Revisi	Jumlah	Porsi
Alamat rumah salah	5 orang	45%
Menikah lagi tidak dilaporkan	3 orang	27%
Anak menjadi TNI (masih di DPCP)	1 orang	9%
Bukan anak kandung masuk SK	1 orang	9%

Jumlah Usulan Pensiun dan Revisi dalam Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) Periode Januari-September Tahun 2026

Ringkasan Data

Dari **334 usulan** yang masuk, **324 berhasil** diproses dan **10 memerlukan revisi**. Mayoritas kesalahan bersumber dari data awal yang belum diperbarui oleh pegawai, bukan dari kegagalan sistem.



TEPAT GUNA

Efisiensi Tanpa Pengembangan Aplikasi Mandiri



Keunggulan SIASN bagi Daerah

SIASN dikembangkan terpusat oleh BKN, sehingga pemerintah daerah tidak perlu mengalokasikan anggaran untuk pengembangan aplikasi baru.

→ **Hemat anggaran daerah, tidak ada biaya pengembangan aplikasi mandiri.**

→ **Layanan paperless, tanda tangan elektronik BSe mendukung legalisasi dokumen digital.**

→ **Koordinasi intensif, penanganan gangguan dilakukan melalui kanal komunikasi daring dengan BKN.**



Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Efektivitas Pelaksanaan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) Dalam Layanan Pensiun Berbasis Teknologi Informasi di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sidoarjo dapat disimpulkan telah berjalan efektif yang telah ditinjau dari dimensi ketepatan waktu, ketepatan sasaran, dan tepat guna. Dimana pada dimensi ketepatan waktu, SIASN mampu mempercepat proses administrasi dan mendukung penerbitan Surat Keputusan (SK) Pensiun sebelum Terhitung Mulai Tanggal (TMT), meskipun masih menghadapi kendala berupa gangguan server yang diantisipasi melalui kebijakan pengajuan usulan pensiun enam bulan sebelum TMT. Pada dimensi ketepatan sasaran, SIASN berhasil mengintegrasikan data kepegawaian secara digital sehingga mempermudah pelayanan pensiun, namun akurasi layanan masih dipengaruhi oleh validitas dan pembaruan data pegawai. Sementara itu, pada dimensi tepat guna, SIASN mampu meningkatkan efisiensi administrasi, mendukung layanan paperless, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi tanpa memerlukan pengembangan aplikasi di tingkat daerah. Namun demikian, efektivitas implementasi SIASN masih memerlukan penyempurnaan melalui peningkatan stabilitas server, optimalisasi fitur verifikasi elektronik, serta penguatan tata kelola dan validasi data kepegawaian agar kualitas layanan pensiun dapat berjalan lebih optimal, cepat, tepat, dan akuntabel.